

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

## Pengesahan Raperda APBD 2023 Diharapkan Tumbuhkan Perekonomian

**JAKARTA (Poskota)** - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta yang telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

DPRD DKI Jakarta memberikan persetujuan dalam Rapat Paripurna mengenai Penyampaian Pendapat Akhir Gubernur tentang Raperda Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (27/9) kemarin.

"Saya menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta yang telah menelaah substansi materi Raperda secara cermat, teliti dan saksama," kata Heru.

Jajaran Eksekutif, telah menindaklanjuti seluruh saran, komentar serta rekomendasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan Legislatif.

Untuk itu, dikatakan Heru, Eksekutif berharap, sinergi bersama Legislatif yang telah terjalin selama ini semakin kuat, terutama dalam mengoptimalkan pelaksanaan program kerja dan kegiatan tahun 2023.

Ia menggarisbawahi, betapa pentingnya menjaga kemitraan yang berkesinambungan antara DPRD DKI Jakarta dengan Pemprov DKI secara proporsional dan profesional.

"Semoga kinerja Pemerintah Daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta," ujar Heru.

Sementara itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto membacakan laporan Banggar bahwa total Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 79,52 triliun.

Pemprov DKI Jakarta berkomitmen melanjutkan kebijakan strategis pada Perubahan APBD 2023, seperti penanggulangan banjir, sampah, kemacetan, polusi, dan penanganan pengangguran. (Aldi/ifn)